BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses akuntansi atau tata keuangan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Institusi-institusi pada pemerintah harus semakin memperbaiki kualitas kinerja keuangan agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi, karena pengguna informasi terutama masyarakat umum menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi pada institusi-institusi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan.

Dalam pengelolahan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan strandar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang keuangan negara, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

> **menimbang bahwa Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia[1].**

Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi). Laporan keuangan diartikan sebagai laporan yang memuat informasi keuangan perusahaan atau instansi pemerintah dalam satu periode akuntansi tertentu yang menggambarkan kinerja perusahaan atau instansi pemerintahan tersebut.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pengguna laporan keuangan berasal dari pihak dengan kepentingan berbeda. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Terdapat kelompok utama pengguna laporan keuangan namun tidak terbatas pada: (a) masnyarakat; (b) wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa; (c) pihak pemberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman daerah; (d) pemerintah. [2]

---

[1] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
[2] Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Laporan keuangan disusun berdarkan standar akuntansi yang berlaku. Pada pemerintah laporan keuangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Laporan keuangan daerah dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Rakyat Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

1) Relevan

   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi

masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi dapat dikatakan andal apabila memiliki karakteristik; (a) penyajian jujur, (b) dapat diverifikasi, (c) netral.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat di dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas pemerintah tersebut sudah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat(TMP).

Tabel 1.1

Daftar Opini LKPD Kota Sibolga Tahun 2015-2019

No	Tahun	Opini
1	2015	Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)
2	2016	Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)
3	2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2019	Wajar Tanpa Pengecualuan (WTP)

(Sumber : www.bpk.go.id)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat dalam kurung waktu 2 tahun terakhir LKPD kota Sibolga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian, akan tetapi pada tahun sebelumnya kota Sibolga masih belum mendapat opini yang baik. Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, termasuk untuk unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.

Permasalahan yang sering ditemukan oleh BPK dalam audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah : (1) pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, (2) proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, (3)

terlambat menyampaikan laporan, (4) sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, dan (5) Sumber Daya Manusia yang belum memadai. [3]

Menurut Rizki Afri Mulia bahwa tinggi rendahnya kualitas informasi laporan keuangan dapat disebabkan pengendalian intern entitas itu sendiri. Untuk mengatasi rendahnya kualitas laporan keuangan maka diharapkan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik dan benar[4]. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dirancang agar pengendalian organisasi stabil dan dikelolah dengan baik. Pengendalian dapat juga dikatakan sebagai pengawasan untuk mencegah dan mendeteksi dan memperbaiki permasalahan pada organisasi. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.[5]

Sistem pengendalian intern memiliki peran untuk meningkatkan kinerja transpalansi, dan akuntabilitas pengelolahan keuangan negara. Sistem pengendalian sangat penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan lagi kualitas

---

[3] Sagung Inten Evicahyani dan Nyoman Djinar Setiawina. **Analisis Faktor-faktor yang mempengarui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.** E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Unud. 2015

[4] Rizki Afri Mulia.2018. **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.** Ejurnal

[5] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerinta. Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 3

penerapan sistem pengendalian internya dan sebaliknya melakukan pengkajian ulang agar tercapainya kualitas informasi keuangan yang baik.

Sistem informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Sistem informasi dikatakan berkualitas apabila sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahannya dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Sistem informasi akan dapat dijalankan dengan optimal apabila suatu entitas memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai pengerak sistem informasi yang ada. Sebuah entitas juga akan menghasilkan informasi yang berkualitas apabila memiliki kompetensi sumber daya manusia dan juga memiliki kapasitas SDM yang memadai. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlinda dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, SDM berperan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Kemampuan Sumberdaya manusia yang berkompeten terhadap pengelolaan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan SKPD.[6]

Selain sumber daya manusia, hal yang mempengarui kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan pemerintah adalah pemamfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, SIKD memberi manfaat atau kemudahan dalam mengolah data

[6] Herlinda. **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau).** E-Jurnal. 2016

pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.[7] Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sagung Inten Evicahyani dan Nyoman Djinar Setiawina dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan yang memperoleh hasil bahwa pemanfaatan SIPKD memiliki pengaruh positif dan *signifikan* terhadap peningkatan kualitas LKPD Kabupaten Tabanan. Dengan kata lain kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sangat dibantu oleh sistem informasi yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan dan dalam pelaporan/penyusunan laporan keuangan.[8]

Penelitian ini merupakan replikasi dari Oloheta Waruhu meneliti dengan judul Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peran Internal Audit, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Nias Barat. Hasil penelitian Oloheta Waruhu mununjukkan secara parsial SAP, peran internal audit, kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada waktu dan tempat penelitian, dan juga variabel dari atribut kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini menarik di replikasi karena masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan kualitas laporan keuangan

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

[8] Sagung Intend dan Nyoman Djinar. **Op.Cit**. Hal 18

pemerintah terutama di Kota Sibolga agar diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan kembali agar kualitas laporan keuangan SKPD semakin baik. Semakin membaiknya laporan keuangan SKPD diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi LKPD Kota Sibolga.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini dilakukan untuk mengarahkan dan memudahkan dalam penelitian yang berfokus secara sistematis. Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah sitem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem informasi keuangan daerah pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, sistem informasi keuangan daerah berpegaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui secara empiris tentang:

1. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Pengaruh sitem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Pengaruh sistem informasi keuangan daerah pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, sistem informasi keuangan daerah berpegaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun mamfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah yang ada di Kota Sibolga
2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Sibolga, dapat memberikan mamfaat sebagai masukan dan wawasan kepada pihak SKPD dalam mengembangkan pemahaman tentang kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, sitem informasi keuangan daerah untuk mewujudkan laporan keuangan daerah yang kualitas.
3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstuktur pada satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi relavan mengenai posisi laporan keuangan dan seluruh transaksi Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efesiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 suatu laporan dikatakan berkualitas apabila memenuhi persyaratan yang normal yang harus dipenuhi sehingga dapat memenuhi tujuan informasi tersebut. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relavan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan

demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya

tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada

kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Teori Kegunaan Informasi

Penelitian ini menggunakan teori kegunaan informasi (*decision-usefulness theory*). Orang pertama yang menggunakan paradigma kegunaan keputusan (*decision usefulness*) adalah Chambers. Akibat yang wajar dari asumsi manajemen rasional adalah bahwa seharusnya ada sistem yang menyajikan suatu informasi; seperti sistem yang diperlukan baik untuk dasar pembuatan keputusan atau dasar untuk memperoleh kembali konsekuensi keputusan. Sistem yang menyajikan informasi secara formal akan menyesuaikan dengan dua dalil umum. Pertama adalah kondisi dari setiap wacana ilmiah, sistem seharusnya secara logika konsisten; tidak ada aturan atau proses yang dapat bertentangan dengan setiap aturan atau proses lainnya. Kedua muncul dari pemakai laporan akuntansi sebagai dasar pembuatan keputusan dari konsekuensi praktik, informasi yang dihasilkan oleh setiap sistem seharusnya relevan dengan berbagai bentuk pembuatan keputusan yang diharapkan dapat digunakan.

Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya.

Konsep *decision usefulness* atas informasi akuntansi memegang peranan penting dalam pengidentifikasian masalah bagi para pengguna laporan keuangan dan penyeleksian informasi akuntansi yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan terbaik. Konsekuensi dari konsep ini adalah bahwa informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memberikan nilai kegunaan (*useful*) kepada para penggunanya (*users*) dalam hal pengambilan keputusan.

Informasi bersifat individu, artinya setiap individu mungkin akan memberikan reaksi yang berbeda terhadap sumber informasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa individu menerima informasi berkelanjutan melalui penerimaan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dan juga dari sumber informasi lain seperti media, dan pengumuman lain yang dapat mempengaruhi keputusan. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai sumber informasi, laporan keuangan adalah penyedia informasi akuntansi yang relevan dan reliabel. Penting dipahami di sini mengapa informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan berguna. Tujuan utama dari akuntansi keuangan ialah menyajikan informasi yang berguna (*usefulness*) bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan.

Zarah Puspitaningtyas mengemukakan :

Agar informasi akuntansi dapat berguna maka dalam penyajiannya harus menekankan pada karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi, yaitu informasi yang relevan (relevansi) dan informasi yang reliabel (reliabilitas). Informasi yang relevan ialah informasi yang mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi keyakinan investor mengenai *future returns*, dan seharusnya di-*release* secara tepat waktu[9]

2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengatakan bahwa entitas akuntansi merupakan unit pemerintah anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari

a. Pemerintah pusat
b. Pemerintah daerah;

---

[9] Zarah Puspitaningtyas. ***Decision Usefulness Approach Of Accounting Information*: Bagaimana Informasi Akuntansi Menjadi *Useful*.** Jurnal Akuntansi Universitas Jamber. AKRUAL 2 (1) (2010), hal 105

c. Kementerian Negara/Lembaga dilingkungan pemerintah pusat

d. Bendahara Umum Negara.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: (a)Laporan Keuangan; dan (b) Laporan Kinerja.

2.3.2 Komponen Laporan Keuangan

Dalam rangkah pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tiap kepala SPKD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya. Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelolahan Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71, komponen lapoean keuaangan adalah sebagai berikut:

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Anggaran Lebih

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

c. Neraca

d. Laporan Operasional

e. Laporan Arus Kas

f. Laporan Perubahan Ekuitas

g. Catatat Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.

2.3.3 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Nomor 10 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengatakan bahwa laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya. Seperti yang kemudian dijelaskan dalam Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

> **tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:**
> **a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;**
> **b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;**
> **c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;**
> **d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;**
> **e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;**
> **f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;**
> **g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya**

Informasi tambahan seperti laporan non keuangan, dapat menunjang pemenuhan tujuan laporan keuangan. Laporan non keuangan dapat dilaporkan secara bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih knprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Menurut Mardismo secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah :

a. Kepatuhan dan pengelolahan (*Comliance and Stewardship*)
b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)
c. Perencanaan dan Informasi Otoritas (*Planning and Authorization Information*)
d. Kelangsungan Oganisasi (*Viability*)
e. Hubungan Masnyarakat (*Public Relation*)

f. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Fact and Figures*) [10]

2.3.4 Fungsi Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relavan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh setiap entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui posisi keuangan dan ssumber daya ekonomi yang dimamfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah mereka lakukan serta hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstuktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas

[10] Mardiasmo.**Akuntansi Sektor Publik.** Edisi Keempat: Andi, Yogyakarta, 2009

seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam mewujudkan tujuan organisasi ditentukan oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang berada didalamnya. Pada organisasi publik seperti pemerintahan, peran sumber daya manusia lebih ditekankan pada kemampuan pelayanan yang terbaik bagi masnyarakat, sehingga organisasi

memiliki reputasi kinerja yang unnggul dan akuntabel dimata masnyarakat. Oleh karena itu kompetensi sumber daya manusia menjadi perhatian khusus baik pimpinan maupun staf pemerintahan. Dalam pemahaman tujuan dan fungsi pelaporan keuangan, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kualitas aparat yang melakukan pengelolahan atau penatausahaan keuangan daerah.

Kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang.[11] Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati.[12] Kompetensi Sumber daya manusia juga merupakan kemampuan seseorang dalam suatu organisasi atau suatu sistem untuk melakukan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas fungsi akuntansi dilihat dari pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, serta keterampilan yang dimiliki. [13]Seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat,

---

[11]Moeheriono. **Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi**. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2012

[12] Andini, Dewi dan Yusrawati. 2015. **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol 24, No.1

[13]Celviana dan Rahmawati.**Pengaruh SDM dan Pemamfaatan TI Terhadap Keterandalan Dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel *Interven*ing Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris Di Pemda Subosukowonosraten).** E-Jurnal.2011

dengan pengalaman diharapkan meminimalisir kesalahan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, sikap, perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. [14]

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena itu perlu perhatian khusus untuk pengelolahan sumber daya manusia. Pengelolahan sumber daya manusia dilakukan agar mampu memberikan kontibusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi jumlah sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, agar dihasilkan laporan yang berkualitas.

Dalam pengelolahan keuangan daerah, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya yang berkualitas dan kompeten. Sumber daya yang berkaitan langsung dengan sistem dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi yang cukup memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan menambah keahlian dibidang akuntansi. Selain memiliki pengetahuan di bidang akuntansi pegawai SKPD dituntut agar memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SKPD juga dituntut untuk memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegagalan yang dialami oleh sumber daya manusia dalam memahami serta

[14] Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Presiden Republik Indonesia

menerapkan ilmu akuntansi akan memiliki dampak pada laporan keuangan, seperti adanya kekeliruhan laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga kualitasnya menjadi buruk[15.]

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan.[16] Beberapa karakteristik kompetensi sumber daya manusia terdiri dari: Tanggung jawab, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan (skill). Indikator yang digunakan untuk mengukur kompetensi sumber daya manausia yaitu dengan melihat latar belakang pendidikan, pemahaman terhadap peraturan dan standar, mampu berinteraksi dengan sistem, pelatihan dan bimbingan teknelogi, serta pengalaman kerja. Menurut Malaya S.P Hasibuan mengatakan **" Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan moral karyawan.**"[17] Pendidikan merupakan indikator yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan tujuan dan fungsi laporan keuangan, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kualitas aparat pemerintah yang melakukan penggelolahan dan penatausahaan keuangan.

---

[15] Kiranayanti dan Erawati, **Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Aktrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 16. Bali 2016

[16] Erra Pratiwi Zai,dkk. **Pengaruh Penerapan *Good Government Governance* Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat)**, E-Jurnal i Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia Medan ,volume 5 No. 1 page 8

[17] H.Malaya S.P Hasibuan, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Edisi Revisi: PT Bumi Aksara,Jakarta, 2017

2.5 Sistem Pengendalian Intern

Menurut peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah[18].

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[19]

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang dilakukan oleh setiap lembaga atau entitas untuk mencapai tujuan lembaga atau entitas. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberi keyakinan terhadap kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta meningkatkan keyakinan pemangku kepentingan.

---

[18] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1

[19] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008**.** Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**,** Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 2

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi :

2.5.1 Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

a) penegakan integritas dan nilai etika;
b) komitmen terhadap kompetensi;
c) kepemimpinan yang kondusif;
d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
h) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas adalah :

a) Nilai intregritas dan etika

Memelihara suasana etika organisasi, menjadi teladan untuk tindakan-tindakan yang benar. Menghilangkan godaan-godaan untuk melakukan

tindakan yang tidak etis dan menegakkan disiplin sebagaimana mestinya;

b) Komitmen terhadap kompetensi

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelasaikan tugas dan fungsi pada masing-masing oisisi dalam instansi pemerintah.

c) Filosofi dan gaya operasi manajemen

Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan;

d) Stuktur organisasi

Kerangka kerja bagi manajement; dalam perencanaan,pengarahan, dan pengendalian organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi;

e) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

Satuan usaha membatasi garis Lingkungan Pengendalian

2.5.2 Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas: (a) identifikasi risiko; dan (b) analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan: (a) tujuan Instansi Pemerintah; dan (b) tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2.5.3 Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

2.5.4 Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib dilakukan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya: (a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan (b) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

2.5.5 Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

2.6 Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) diperlukan dalam menyediakan informasi keuangan daerah yang komprehensip kepada masnyakat luas, serta dasar bagi para pejabat dalam membuat keputusan dalam kebijakan fiskal. Sistem informasi keuangan ini juga merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap seluruh hasil pembangunan. Sistem Keuangan Daerah (SIKD) merupakan sebuah sistem yang juga melakukan pengelolahan keuangan daerah. Dalam setiap pelaksanaan pengelolahan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan

dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. [20]

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tujuan penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagai berikut:

> **Pemerintah menyelenggarakan SIKD secara nasional dengan tujuan: merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional; menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional; merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian defisit anggaran; dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran daerah.**

Sistem informasi keuangan daerah menghasilkan hasil keluaran (*output*) berupa informasi. Fungsi utama dari informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi.[21] Oleh karenanya kualitas informasi menjadi sangat penting. Kualitas informasi akan sangat tergantung kepada 3 hal yaitu sebagai berikut:

1) Informasi harus akurat

   Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Pentingnya informasi yang akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (*noise*) yang dapat mengubah dan merusak informasi tersebut.

2) Informasi harus tepat pada waktunya

---

[20] Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Sistem. Pasal 1 angka 15

[21] Dr. Kusnendi. **Modul 1 Konsep Dasar Sistem Informasi**. Perpustakaan digital UT

Informasi yang dikirim atau diterima tidak boleh terlambat diterima si penerima, hal ini dikarenakan informasi yang usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Apalagi jika informasi tersebut merupakan dasar untuk dijadikan dalam pengambilan keputusan. Jika pengambilan keputusan terlambat maka berakibat fatal bagi suatu organisasi. Perlu dipahami, mahalnya informasi dikarenakan harus cepatnya didapat sehingga diperlukan teknologi informasi untuk mengolah dan mengirimkannya.

3) Informasi harus relevan Informasi harus memiliki manfaat bagi pemakainya dan relevansi informasi bagi setiap orang akan berbeda.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelian terdahulu yang sehubungan dengan penelitian ini adalah dapat diikhtisarkan sebagai berikut

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	Oloheta Waruhu (2019)	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Peran Audit Internal , dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi	Variabel Independen : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Peran Audit Internal , dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Secara parsial Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Peran Audit Internal , dan Kompetensi Sumber Daya berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ada SKPD Kabupaten Nias Barat	Variabel Dependen : Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah ada SKPD Kabupaten Nias Barat
2	Rizki Afri Mulia (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualaitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)	Variabel Independen : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3	Sagung Inten Evicahyani dan Nyoman Djinar Setiawina (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan	Variabel Independen : Kompetensi SDM, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemamfaatan Sitem Informasi Pengelolahan Keuangan Daerah (SIPKD), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIP) Variabel Dependen : Kualitas LKPD	Kompetensi SDM, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemamfaatan Sitem Informasi Pengelolahan Keuangan Daerah (SIPKD), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

4	Putu Upabayu Mahaputra & Wayan Putra (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen : Kapasitas SDM, Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Varabel Dependen: Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan	Kapasitas SDM, Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi akuntansi pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar
5	Harlinda (2016)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau)	Variabel Independen : Sumber Daya Manusa (SDM), Teknelogi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Komitmen Organisasi, Pemahaman Akuntansi, Faktor Eksternal Variabel Dependen : Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM, Teknelogi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemahaman Akuntansi, Faktor Eksternal berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan Daerah. Akan tetapi Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kualaitas Informasi Laporan Keuangan Daerah

2.8 Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.8.1 Kerangka Konseptual

Penelitian bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas informasi laporan keuangan daerah terhadap variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, sistem informasi keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dikemukakan tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan kompetensi sumber daya manusia untuk menyusun laporan keuangan, adanya dukungan sistem pengendalian intern yang baik dan sistem informasi keuangan daerah yang memadai untuk memparkan informasi keuangan.

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas dan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut, relavan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan uraian tersebut maka adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

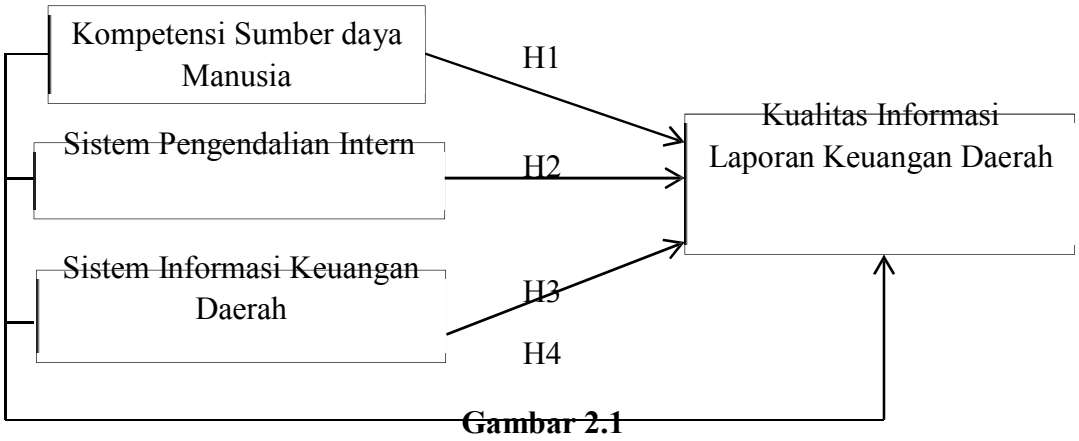

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

2.8.2 Pengembangan Hipotesis Penelitian

1. **Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sumber daya manusia (SDM) adalah seorang atau individu yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Kemampuan sumber daya manusia sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil yang berkualitas. Selain itu dengan adanya kompetensi yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas akan memungkinkan terwujudnya informasi laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Oloheta Waruhu, menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Sagung Inten Evi Cahyadi dan Nyoman Djinar Setiawina, hasil penelitiannya menunjukkan kompetensi SDM dapat

meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Sumber daya manusia yang berkompetensi yang memiliki latar belakang pendidikan, pemahaman standar akuntansi pemerintah, serta pengalaman kerja. Artinya tinggi rendahnya kualitas informasi laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang baik

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dapat dirumuskan yaitu :

H1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2. Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan proses yang terstuktur atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai yang dilaksanakan secara terus menderus agar memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. SPI dilakukan agar agar tercapainya kegiatan yang efektif dan efesien, laporan keuangan yang handal, pengamanan terhadap aset Negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP juga dikatakan sebagai suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[22] Pengendalian intern juga merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi,

[22] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern pemerintah

dan mengukur sumber daya suatu organisasi , serta mempunyai peran penting dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya pengelapan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Afri Mulia menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh teradap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Putu Upabayu Mahaputra dan Wayan Putra juga menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sagung Inten Evi Cahyadi dan Nyoman Djinar Setiawina menunjukkan bahwa secara parsial sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua dapat dirumuskan yaitu:

H2 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah

Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi yang mendukung. Sistem informasi keuangan dimanfaatkan untuk mendekomentasikan, mengadmitrasikan, serta mengelolah data keuangan daerah atau data yang terkait lainnya menjadi suatu informasi yang berguna bagi masnyarakat yang akan disajikan sebagai dasar

pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi yang handal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain kualitas laporan keuangan yang dihasilakan sangat dibantu oleh sistem informasi yang dimiliki dalam pengelolahan keuangan dan dalam pelaporan/peyusunan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Upabayu Mahaputra dan Wayan Putra menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah. Penelitian oleh Sagung Inten Evi Cahyadi dan Nyoman Djinar Setiawina juga menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolahan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas infomasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Herlinda bahwa teknelogi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan yaitu:

H3 : Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan daerah

4. Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Infomasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan penjelasan hipotesis pertama, kedua dan ketiga yang dikemukakan diatas penunjukkan bahwa sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan sistem informasi keuangan daerah mempengaruhi kualitas informasi keuangan

pemerintah daerah. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkompetensi akan menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendali intern merupakan penunjang suksesnya suatu kegiatan organisasi. Dalam entitas pemerintah tidak jauh berbeda, sistem pengendalian intern merupakan idikator suksesnya suatu kegiatan. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sistem informasi keuangan yang baik. Begitu juga di entitas pemerintah, untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik dibutuhkan dukungan sistem yang baik juga.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat dapat dirumuskan yaitu :

H4 : Sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, sistem informasi keuangan

BAB III METODE

PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Sugiyono menyatakan bahwa variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengarui atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Sedangkan variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengarui atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). [23] Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah (Y) dan variabel independen adalah Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), Sistem Informasi Keuangan Daerah (X3).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal. Umar mengemukakan bahwa: **" Dersain kausal berguna untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu dengan yang lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengarui variabel lainnya."**[24]Dengan penelitian ini maka dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.

[23] sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,** Penerbit: Alfabeta. Bandung. 2010, hal 39

[24] Husen Umar**, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis.** Edisi kedua: Rajawali Pers. Jakarta,2008

3.3 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga, dengan cara menyebarkan kuesioner kepada bagian pegawai akuntansi/keuangan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga. Alasan penelitian ini dilakukan di SKPD Pemerintah kota Sibolga karena ingin memperoleh gambaran dan bukti empiris tentang Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Keuangan Daerah.

3.4 Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah (Y) dan variabel independen kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), Sistem Informasi Keuangan Daerah (X3). Berikut dijelaskan defenisi dan operasionalisasi Variabel yaitu:

Tabel 3.1

Defenisi Operasionalisasi Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator
X1 Kompetensi Sumber daya	Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang	Kemampuan dan pemahaman terhadap standar Pengetahuan dalam bidang akuntansi

manusia	didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja yang mengaju pada persyaratan kerja yang ditetapkan (Sutrisno,2009)	Kemampuan terhadap peraturan Pendidikan dan pelatihan SDM Memiliki pengalaman
X2 Sistem Pengendalian Intern	Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008)	Lingkungan Pengendalian Penilaian Resiko Kegiatan Pengendalian Informasi dan Komunikasi
X3 Sistem Informasi Keuangan Daerah	Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendekomentasikan, mengadministrasikan, serta mengelolah data keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masnyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.	Tingkat ketepatan waktu Akuntabilitas Tingkat kualitas hasil Efesien dan Efektivitas

	(PP Nomor 56 Tahun 2005)	
Y Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Sejauh mana informasi konsisten dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orng yang membutuhkan informasi tersebut untuk melakukan proses mereka (Surastiani, 2015)	Aktivitas keuangan dimasa lalu Memprediksi masa yang akan datang Ketepatan waktu penyajian Pengambilan keputusan Disajikan wajar dan jujur Informasi dapat dibandingkan Informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami sesuai SAP

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Sugiyono mengemukakan

"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya."[25]

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai yang ada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Sibolga.

Tabel 3.2

Daftar SKPD yang ada di Kota Sibolga

No	Nama Dinas/ Badan
1	Dinas Inspektorat
2	Badan Perencanaan Pembagunan Daerah
3	Badan Kepegawaian Daerah

[25] Sugiyono, **Op.Cit.**, hal. 80

4	Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Dinas Kesehatan
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Pertanian
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
14	Dinas Perhubungan
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan,dan Perlindungan Anak
18	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
19	Dinas Komunikasi Dan Informatika
20	Dinas Sosial
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu (PPTSP)
22	Dinas Perpustakaan
23	Direktur Rumah Sakit Umum Dr. F.L Tobing

Sumber: sibolga.kota.go.id

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai presentasi dari populasi secara keseluruhan. Dengan demikian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh popolasi. [26] Pengambilan sampel dalam penelitian dikarenakan keterbatasan dalam segi biaya dan waktu penelitian. Pengambilan sampel diharapkan dapat mengambarkan keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini hanya beberapa SKPD yang terdiri dari : 1 DPRD, 1 Inspektorat, 1 Badan

[26] **Ibid**, hal. 81

Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 1 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, 6 Dinas (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Parawisata pemuda dan olah raga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Penyampelan atas responden dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Porposive Sample. Purposive sampling* menurut Sugiyono adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. [27]Pemilihan sampel dilakukan diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kreteria sampel dalam penelitian ini yaitu :

1. Pegawai yang melaksanan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan pada setiap SKPD Kota Sibolga yang terlibat secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan, yang meliputi bagian keuangan, bendahara dan para staff.
2. Pejabat yang bertanggung jawab di bagian akuntansi/penatausahaan keuangan dalam pemmbuatan laporan keuangan pada masing-masing SKPD.
3. Pegawai/Staff bagian akuntansi yang disebut Pembantu Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD (Pembantu PKK-SKPD).
4. Pegawai yang menjadi subjek pemeriksaan APIP dari Inspektorat .

Pegawai yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah bagian keuangan, dan para staf yang terlibat dalam penyusunan pelaporan keuangan pada SKPD Kota Sibolga. Selanjutnya , kreteria yang diambil dari populasi untuk dijadikan

[27] Sugiono. **Loc.Cit**

sebagai sampel dalam penelitian ini berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Jabatan dan Lama Bekerja. Selain itu juga pegawai yang memiliki pendidikan terkahir minimal SMA dan telah bekerja minimal 1 (satu) tahun pada SKPD tersebut.

Berdasarkan kreteria tersebut, adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 SKPD di Kota Sibolga yang berjumlah 40 responden yang masing-masing SKPD ada 4 (empat) orang responden. Adapun 40 responden yang dijadikan sampel tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 3.3

Responden pada SKPD

No	SKPD Kota Sibolga	Jabatan	Jumlah Responden
1	**DPRD**		
		Kepala Sub Bagian Keuangan	1
		Bendahara	1
		Staf Pembantu PPK-SKPD	2
2	**Inspektorat**		
		Kepala Sub Bagian Keuangan	1
		Bendahara	1
		Staf Pembantu PPK-SKPD	2
3	**BPKAD**		
		Kepala Sub Bagian Keuangan	1
		Bendahara	1
		Staf Pembantu PPK-SKPD	2
4	**Pemberdayaan Masnyarakat Kelurahan**		
		Kepala Sub Bagian Keuangan	1

		Bendahara	1
		Staf Pembantu PPK-SKPD	2
5	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**		
		Kepala Sub Bagian Keuangan	1
		Bendahara	1
		Staf Pembantu PPK-SKPD	2
6	**Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga**		
		Kepala Sub Bagian Keuangan	1
		Bendahara	1
		Staf Pembantu PPK-SKPD	2
7	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan**		
		Kepala Sub Bagian Keuangan	1
		Bendahara	1
		Staf Pembantu PPK-SKPD	2
8	**Dinas Perhubungan**		
		Kepala Sub Bagian Keuangan	1
		Bendahara	1
		Staf Pembantu PPK-SKPD	2
9	**Dinas Sosial**		
		Kepala Sub Bagian Keuangan	1
		Bendahara	1
		Staf Pembantu PPK-SKPD	2
10	**Dinas Perpustakaan**		
		Kepala Sub Bagian Keuangan	1
		Bendahara	1
		Staf Pembantu PPK-SKPD	2
Total Responden			**40 Orang**

3.6 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut sugiyono " **Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data**". [28] Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud perolehan langsung dari instansi pemerintah daerah dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan sumber informasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti, atau dikirim langsung menggunakan media kumunikasi (email, WA), maupun tanya jawab secara langsung dengan beberapa responden bagian akuntansi/keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut sugiyono " **Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen"**. [29]Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adala data yang didapat dari lembaga pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden untuk mengisi kuesioner. Daftar pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan terstuktur dan responden tinggal memberi tanda checklish.

---

[28] Sugiyono. **Metode Penelitian Pendidikan**. Edisi Revisi: 15. Alfabeta: Bandung .2010
[29] **Loc.cit**

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Vadilitas

Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur ketepatan dan kecermatan suatu variable terkait fungsinya, dan digunakan untuk menunjukkan sah atau tidaknya kuesioner yang digunakan dalam suatu penelitian. Pengujian dengan menggunakan uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *Pearson Correlation* dengan r tabel. Nilai r tabel yang dipakai adalah nilai dengan signifikan 5% (0,05).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel, suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawabanya dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. [30]Untuk meguji reliabilitas digunakan pengujian *croanbach alpha,* dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kurang dari 0,6 tidak reliabel
b. 0,6 – 0,7 akseptabel
c. 0,7 –0,8 baik
d. Lebih dari 0,8 reliabel

[30] Westriningsih.2012. **SPSS 20**. Penertbit Andi

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetaui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi, pengujian ini meleiputi :

1. **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dengan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Data yang baik adalah yang mempunyai pola seperti distribusi normal (tidak mencong ke kiri atau ke kanan). [31]Pada penelitian ini, uji normalitas sebaran data dilakukan dengan memembandingkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dengan kriteria pengujian yang dapat dilihat pada tingkat signifikansi data. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

a. Jika nilai *Sig* > *α* 0.05 maka dikatakan berdistribusi normal
b. Jika nilai Sig < α *0,05* maka dikatakan berdistribusi tidak normal

2. **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolienaritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).[32] Menurut Ghozali pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat kerelasi antara variable independen. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Varience Inflation Factors)*> 10 dan *tolerance* > 10. Jika tolerance value dibawah 0,10 , maka terjadi gejala multikolonearitas.

3. **Uji Heteroskedastitas**

[31] Enterprise, Jubilee. 2018. **SPSS Komplet Untuk Mahasiswa**. Jakarta. Kompas Gramedia

[32] Husein Umar, **Op.Cit**,. hal 177

Uji heteroskedastitas bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya dengan menggunakan uji Grafik *Scatter Plot* yang terdapat dalam program *SPSS 22.0 for window*. Apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier berganda, yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Konsekuensi dari heteroskederitas yaitu, jika terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskederitas, seingga model regresi layak digunkaan berdasarkan masukan variabel X terhadap Y.

3.9 Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan pengujian analisis regresi berganda *(Multiple Reggression Analysis)* yang merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh antara dua variabel atau lebih variabel untuk melihat pengaruh secara parsial dan simultan[33]. Analisis berganda digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel independen, yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, sistem informasi keuangan daerah terhadap satu variabel dependen yaitu kualitas informasi keuangan pemerintah daerah.

[33] Arifin, Johar. 2017. **SPSS Untuk Penetian dan Skripsi.** Kompas Gramedia

3.8.1 Koefisien Derminan (*RSquare*)

Koefisien determinan(*RSquare*) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefesien determinan (*RSquare*) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen (pemahaman standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, sistem informasi keuangan daerah). Suatu nilai bisa dikatakan baik apabila angka > α 0,5, sebaliknya suatu nilai koefisien determinasi dikatakan tidak baik jika < α 0,5. Jika mengacu dari hasil penghitungannya, maka sebuah model regresi linier ganda dikatakan layak dipakai jika nilai dari *RSquare* lebih dari < α 0,5.

3.8.2 Uji Regresi Parsial (*T-test)*

Uji parsial bertujuan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh variabel independen secara individual (secara persial) terhadap variabel yang menganggap variabel lain bersifat kostan. Ada atau tidaknya pengaruh signifikan dari masing-masing variabel independen terdapat variabel dependen dapat diketahui dengan membandingkan nilai signifikannya dengan derajat kepercayaan. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan nilai t-tabel[34]. Apabila tingkat signifikan lebih kecil dari α 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya apabila tingkat signifikan lebih besar dari α 0,05 maka hipotesis ditolak.

[34] Pramesti, Getut. 2016. **Statistika Lengkap dsecara Teori dan Aplikasi Dengan SPSS**. Kompas Gramedia

3.9.3 Uji Regresi Similtan (*F-test*)

Uji Regresi Similtan (*F-test*) dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen secara bebas dengan signifikan lebih kecil dari 0,05. Pengujian dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila F-hitung > dan F-tabel (alfa) 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya apabila F-hitung < F-tabel (a alfa)0,05 maka hipotesis ditolak. Uji F dapat dilihat pada *output* ANOVA dari hasil analisis regresi linear berganda, dengan kreteria pengujian. [35]

[35] Pramesti, Getut. **Op.Cit.** Hal 76